



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JACK PUJANTO**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI**
3. NHK : **475320**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.863.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 156 m2 di KAB / KOTA MALANG, Rp. 156.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/72 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
4. Tanah Seluas 1.380 m2 di KAB / KOTA MALANG, Rp. 690.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/84 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 162.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 99.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINI BUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA GL 100 Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 21.732.750**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 178.637.168**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 2.162.869.918**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.162.869.918

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.